

TINJAUAN GEOGRAFI REGIONAL TERHADAP MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (MP3EI)

A Review of Economic Development Acceleration and Expansion Masterplan of Indonesia in Regional Geography Perspective

M. Baiquni

Program Studi Pembangunan Wilayah

Fakultas Geografi UGM

Email: baiquni99@gmail.com

ABSTRACT

Regional Geography at national level is a study of unique characteristics and pattern of natural phenomena and human phenomena in a certain region which are delineated and regionalized for certain purpose. In this perspective, Masterplan MP3EI was launched by since 2011 be analyzed on how its relations with backward regions and boundary regions. A critical review related to what is the concept behind and how are the strategies implement this program. The research methods are literature review, maps pattern analysis, and indept interview. The results of this research are (1) MP3EI is driven by economic growth strategy and lack of local politics involvement i.e. autonomy; (2) The economic corridor of MP3EI partly related to backward region and boundary region of Indonesia; (3) There are many challenges on how to implement MP3EI such as: integration foreign high investment with local economy, synergy to autonomy, preserve nature conservation area, and enrich cultural heritage of cultural diversity.

Keywords: regional geography, policy implementation, masterplan MP3EI

ABSTRAK

Geografi Regional mempelajari keunikan karakter dan pola dari fenomena alam maupun manusia dalam suatu wilayah tertentu yang didelineasi dan diregionalisasi untuk tujuan tertentu. Dalam perspektif tersebut Masterplan MP3EI yang diluncurkan tahun 2011 dianalisis keterkaitannya dengan pembangunan daerah tertinggal dan wilayah perbatasan. Diperlukan tinjauan kritis untuk mengetahui konsep dibelakangnya dan bagaimana strategi untuk implementasi programnya. Metode yang digunakan adalah melakukan review kritis literature dan dokumen, analisis pola peta koridor, dan wawancara mendalam. Hasil yang diperoleh adalah: (1) MP3EI dikembangkan oleh pemerintah pusat dengan strategi pertumbuhan ekonomi dan kurang melibatkan dinamika politik lokal, misalnya otonomi daerah; (2) Koridor ekonomi MP3EI hanya sebagian kecil yang bertautan dengan daerah tertinggal; (3) Banyak tantangan yang harus dijawab dalam pelaksanaan MP3EI, seperti bagaimana mengintegrasikan investasi asing besar-besaran itu dengan modal penghidupan ekonomi rakyat, sinergi dengan program daerah otonom, konservasi sumberdaya alam dan pengayaan khazanah keragaman budaya setempat.

Kata kunci: geografi regional, implemnasi kebijakan, dokumen MP3EI

PENDAHULUAN

Pembangunan wilayah di negara kepulauan memerlukan pendekatan dan strategi yang cocok dengan kondisi ekosistem dan sumberdaya alam serta situasi dinamika masyarakatnya. Sepanjang sejarah kemerdekaan Republik Indonesia selama hampir tujuh dasawarsa, telah mengalami pasang surut pembangunan dan berbagai dampak yang mengikutinya. Pada saat kemerdekaan Indonesia merupakan sebuah negara yang perekonomiannya berbasis kegiatan pertanian tradisional, saat ini Indonesia telah menjadi negara dengan proporsi industri manufaktur dan jasa yang lebih besar.

Kemajuan ekonomi telah membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang tercermin dalam peningkatan pendapatan per kapita, perbaikan berbagai indikator sosial dan ekonomi lainnya termasuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam periode 1980 dan 2010, Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 0,39 ke 0,60. Indonesia juga memainkan peran yang makin besar di perekonomian global. Saat ini Indonesia menempati urutan ekonomi ke-17 terbesar di dunia. Keterlibatan Indonesia pun sangat diharapkan dalam berbagai forum global dan regional seperti ASEAN, APEC, G-20, dan berbagai kerjasama bilateral lainnya (Buku Masterplan MP3EI, 2011:14).

Perkembangan ekonomi Indonesia perlu dikritisi, dikoreksi dan perlu terus-menerus dibenahi. Duddley Seers (1973) mengungkapkan bahwa pembangunan suatu negara dikatakan gagal apabila kemiskinan semakin banyak, pengangguran semakin luas dan kesenjangan pembangunan antar wilayah semakin dalam. Tiga aspek penting yang dikemukakan seorang pemikir pembangunan itu, kiranya relevan untuk ditambahi dengan dua aspek yang penting yaitu "pembangunan dikatakan gagal apabila kerusakan lingkungan terjadi dimana-mana dan kemaksiatan merajalela". Penulis menganggap penting dua

aspek ini, mengingat banyaknya bencana alam akibat kerakusan pembangunan dan meluasnya dekadensi moral akibat ambisi yang tidak terkendali, kesemuanya yang dapat menghancurkan kehidupan bangsa.

Tantangan ke depan pembangunan ekonomi Indonesia tidaklah mudah untuk diselesaikan sendiri. Dinamika ekonomi domestik dan global mengharuskan Indonesia senantiasa siap terhadap perubahan dan siap melakukan kerjasama. Gelombang perubahan sedang terjadi mengarah pada pergeseran dari Atlantik ke Pasifik, dari Amerika dan Eropa ke Asia. Keberadaan Indonesia di pusat baru gravitasi ekonomi global, yaitu kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, mengharuskan Indonesia mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk mempercepat terwujudnya suatu negara maju dengan hasil pembangunan dan kesejahteraan yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat.

Transformasi pembangunan semesta bukan hanya ekonomi semata, namun diperlukan pula pembangunan ekonomi sebagai salah satu sendi pembangunan semesta. Dalam konteks inilah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyadari perlunya penyusunan MP3EI untuk memberikan arah pembangunan ekonomi Indonesia hingga 2025. Melalui percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi ini, perwujudan kualitas Pembangunan Manusia Indonesia sebagai bangsa yang maju tidak saja melalui peningkatan pendapatan dan daya beli semata, namun dibarengi dengan membaiknya pemerataan dan kualitas hidup seluruh bangsa (Masterplan MP3EI, 2011).

Pembangunan wilayah kepulauan memerlukan perspektif dan pendekatan yang tepat dalam pembangunan ekonomi nasional. Beragam teori dan konsep pembangunan yang selama ini lahir dari pemikiran continental, belum tentu bisa diterapkan dalam konteks negara kepulauan. Hal ini memerlukan pengkajian mendalam para ahli pembangunan Indonesia untuk

menemukan konsep dan pendekatan yang cocok untuk negara kepulauan ini.

Kajian koridor pembangunan dengan mengaitkan antar pusat pertumbuhan telah dikemukakan; antara lain mengenai model kerjasama segitiga pertumbuhan Joglosemar (Baiquni, 1998), transformasi spasial perkotaan dan segitiga pertumbuhan ekonomi (Muta'ali, 1998), transformasi wilayah di koridor Yogyakarta dan Surakarta (Giyarsih, 2010). Pada kajian tersebut memperlihatkan bahwa koridor pembangunan sangat terkait dengan: (1) adanya pusat-pusat pembangunan seperti perkotaan dan kawasan industri; (2) aksesibilitas yang menghubungkan antara pusat-pusat pembangunan; (3) adanya keunggulan komparatif yang saling memerlukan, (4) aliran barang dan jasa serta orang yang bergerak antar pusat-pusat tersebut untuk mendapatkan nilai tambah yang optimal, (5) tidak ada hambatan yang berarti guna terjadinya hubungan dan kerjasama antar pusat-pusat tersebut. Dengan demikian perkembangan koridor pembangunan terkait dengan kepentingan kerjasama antar pusat-pusat pembangunan tersebut yang merangkai, sehingga membangkitkan pertumbuhan pembangunan wilayah koridor.

Kajian koridor pembangunan pada umumnya masih dalam perspektif ekonomi dan perspektif spatial perkembangan fisik infrastruktur pembangunan, belum banyak yang mengaitkan dengan perspektif sosial budaya seperti kearifan lokal sebagai pondasi dan pilar pembangunan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Wesnawa (2010) yang mengungkapkan bahwa kecenderungan pembangunan dewasa ini masih kurang memperhatikan pelestarian kekayaan sosial budaya sebagai bagian integral dari seluruh program pembangunan dan pemanfaatan ruang. Disini diperlukan perhatian yang serius mengenai karakteristik sosial budaya masyarakat dan keterlibatan mereka dalam mengembangkan koridor pembangunan, mengingat wilayah koridor tidak sama dengan

pusat-pusat pertumbuhan kota itu sendiri. Keunikan dan keunggulan wilayah koridor perlu menjadi dasar dan identitas, agar pembangunan tidak membosankan karena seragam seperti kota-kota besar lainnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara kritis kebijakan MP3EI dalam perspektif Geografi Regional. Secara rinci penelitian ini berupaya menelusuri konsep di belakangnya dan bagaimana strategi implementasi kebijakan. Lebih lanjut penelitian ini membahas keterkaitan MP3EI dengan pembangunan daerah tertinggal dan wilayah perbatasan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Studi literatur dan review kritis dokumen MP3EI; (2) Overlay peta dan analisis pola peta koridor MP3EI dikaitkan dengan daerah tertinggal dan wilayah perbatasan; dan (3) wawancara mendalam dengan pakar dan pelaku pembangunan wilayah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Geografi Regional

Geografi Regional dalam studi suatu negara mempelajari keunikan karakter dan pola dari fenomena alam maupun manusia dalam suatu wilayah tertentu yang didelineasi dan diregionalisasi untuk tujuan tertentu. Aspek-aspek Geografi Regional yang biasanya dipelajari antara lain unsur geografis (berupa luas, bentuk wilayah, iklim, sumber daya, penduduk) dan pembangunan (terkait dengan batas wilayah, kedaulatan atas sumberdaya, dan pola kekuasaan pusat daerah, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kemakmuran, serta kesejahteraan sosial dan keragaman budaya). Dalam studi geografi regional, unsur geografi dan unsur pembangunan dikaji

secara kewilayahan meliputi karakter, pola, koneksi, dinamika dan kecenderungannya.

Dov Nir dalam bukunya *Region as a Socio-environmental System: An Introduction to a Systematic Regional Geography* (1990) mengemukakan pentingnya memahami kecenderungan fenomena penyeragaman kehidupan di tengah kehidupan yang beragam. Peradaban dunia berada di persimpangan jalan apakah akan terus menuju keseragaman menuju budaya global atau mempertahankan keberagaman kehidupan? Pilihannya saat itu bagi masyarakat negara-negara berkembang adalah mengikuti *totalitarianism* atau *pluralism* berkaitan dengan kehidupan sosial ekonomi. Ia menekankan pada kebebasan (*freedom*) yang merupakan hak pilihan untuk berbeda dengan yang lain.

Francis Fukuyama dalam bukunya *Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity* (1995) menyoroti aspek-aspek budaya yang mendasari pertumbuhan ekonomi di Asia Timur. Menurutnya kepercayaan masyarakat merupakan dasar yang penting bagi pertumbuhan ekonomi Asia. Kegiatan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial dan politik masyarakat luas. Dengan preposisi seperti itu, maka reformasi ekonomi dengan sendirinya memerlukan reformasi politik dan sosial yang berbasis rasa saling percaya. Percepatan dan perluasan ekonomi memerlukan basis kepercayaan yang dibangun antara pemerintah pusat dan daerah otonom, antar sektor dan aktor pelaku pembangunan. Keberlangsungan percepatan dan perluasan ekonomi ditentukan oleh kerjasama yang erat berdasarkan nilai keadilan dan kepercayaan diantara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Pada dekade 1990an akselerasi pembangunan kerjasama ekonomi regional di antara negara tetangga semakin nyata. Proses kerjasama ekonomi regional merupakan upaya untuk menjalin keunggulan komparatif wilayah tersebut dan membangun keunggulan kompetitif dalam menghadapi blok ekonomi lain. Ekonom

Jepang, Kaname Akamatsu, melukiskan proses semacam itu menggunakan paradigma "Formasi angsa terbang" (Soesastro, 1990). "Angsa" paling depan memimpin kemana arah dan manuver terbang yang diikuti oleh anggota kelompok lainnya. Sebagai contoh dalam kerjasama Sijori (Singapura, Johor dan Riau), maka Singapura merupakan "angsa terdepan" kerjasama itu.

Wilayah yang selama ini dianggap pinggir (*frontier region*) seperti Kepulauan Riau dan wilayah perbatasan lainnya (*border region*) perlu dikembangkan dengan melibatkan pengembangan masyarakat luas, terutama penduduk asli memperoleh manfaat dan kesejahteraannya meningkat. Belajar dari pengalaman Sijori, keuntungan dari kerjasama ekonomi tersebut adalah mereka yang kuat baik dalam modal, teknologi maupun lobi. Bagi masyarakat lokal masih banyak yang belum memperoleh manfaat secara adil dari proses pembangunan di wilayahnya (Sasono, 1993). Oleh karena itu pengembangan kerjasama ekonomi regional selanjutnya perlu diikuti kemitraan diantara para pelaku pembangunan (*stakeholders*) dan melakukan penguatan (*empowerment*) kelompok masyarakat secara luas.

Dalam kaitan dengan koridor MP3EI, maka gagasan diatas menarik untuk ditinjau kembali. Misalnya koridor ekonomi Bali dan Nusa Tenggara, dimotori oleh tema pariwisata yang digerakkan utamanya oleh Bali yang sudah memiliki reputasi dunia. Dalam pengembangan pariwisata bukan keseragaman pola ekonomi, tetapi keragaman sumberdaya pariwisata (alam dan budaya) yang unik itu masing-masing memiliki segmen pasar tersendiri. Sebagai konsekuensinya Nusa Tenggara tidak harus meniru Bali dalam mengolah dan mengelola sumberdaya pariwisatanya. Keragaman lah yang menjadi basis keunggulan kompetitif setiap pulau atau setiap komunitas yang dapat menghadirkan keunikan. Dalam kaitan itu pula perlu dikembangkan model

kepari-wisataan berbasis masyarakat (*community based tourism*), kepariwisataan berwawasan lingkungan (*ecotourism*), dan kepariwisataan yang bertanggungjawab (*responsible tourism*) terutama di pulau-pulau kecil yang memiliki keunikan sumberdaya alam dan kemajemukan budaya masyarakatnya, agar pariwisata tidak menjadi bentuk penjajahan baru (*neo colonialism*) atas nama percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi.

Perspektif Geografi Regional yang digunakan untuk mengkaji masterplan MP3EI terkait dengan bagaimana pemerintah pusat memprakarsai kebijakan pembangunan (dengan percepatan dan perluasan yang menekankan pada sektor ekonomi) dalam suasana otonomi daerah. Keragaman dan keunikan masing-masing daerah tidak perlu menjadi seragam dalam format koridor ekonomi pertumbuhan. Masing-masing wilayah dan komoditi ekonomi bisa saling melengkapi, keunggulan komparatif disulam dan keunggulan kompetitif ditonjolkan. Pijakan berfikir kritis penelitian ini adalah bagaimana *Bhinneka Tunggal Ika* menjadi spirit bagi pembangunan wilayah negara kepulauan Republik Indonesia.

Perubahan Strategi Pembangunan

Kebijakan pembangunan wilayah di Indonesia telah mengalami berbagai pergeseran dari periode ke periode terkait dengan dinamika politik nasional maupun perubahan pembangunan internasional. Pada masa revolusi pembangunan berangkat dari basis menemukan karakter keragaman daerah dan pembangunan ideologi politik terutama membangun karakter bangsa secara nasional (*national character building*). Pada masa itu juga penuh dengan pergolakan pusat dan daerah yang merupakan dinamika mencapai titik temu kepentingan dan membangun pengalaman bersama. Sejak awal kemerdekaan, pembangunan Indonesia diwarnai berbagai corak; antara

lain ditandai dengan: 1) upaya memenuhi kebutuhan dasar kehidupan masyarakat seperti pemenuhan sandang pangan; 2) pembenahan sarana produksi sandang pangan; 3) pengambilalihan atau menasionalisasikan perusahaan Belanda dengan; 4) hingga proyek mercusuar yang berhasil membangun Monas, Masjid Istiqlal, Gelora Senayan, Jembatan Semanggi dan kawasan Jakarta Selatan.

Suasana pembangunan pada periode Presiden Soekarno telah dilakukan dengan berupaya membangun secara Berdikari (berdiri diatas kaki sendiri), meskipun tidak lepas dari upaya kerjasama dengan negara lain seperti Uni Soviet, China dan Jepang. Periode ini berakhir dengan krisis ekonomi dan melambungnya harga-harga kebutuhan sandang pangan serta inflasi yang tak terkendali, sehingga terjadi krisis kekuasaan dan pergantian kepemimpinan nasional.

Pada periode berikutnya setelah Presiden Soeharto naik ke puncak kekuasaan, suasana berganti dengan pengaruh kuat dari Amerika dan sekutunya dalam merancang pembangunan ekonomi Indonesia. Pembangunan dilakukan secara bertahap dan terencana melalui Repelita (rencana pembangunan lima tahun) yang banyak diilhami oleh berbagai pemikiran ekonom Amerika seperti WW Rostow yang terkenal dengan konsepnya *the Stages of Economic Growth*. Pada periode ini pembangunan dimulai dengan sektor pertanian sebagai basis dan wilayah perdesaan sebagai tumpuan pembangunan, dengan proyek seperti bendungan raksasa, jaringan irigasi, jembatan dan jalan, serta berbagai sarana pendidikan (SD Inpres) dan kesehatan (Puskesmas).

Strategi pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, transfer teknologi, relokasi industri terutama di perkotaan ini dikritik oleh kalangan pemikir kritis dan kalangan Ornop atau LSM. Kemudian muncullah pula alternatif kebijakan pembangunan seperti pendekat-

an kebutuhan dasar (*basic need approach*), pembangunan perdesaan (*integrated rural development*), teknologi tepat guna (*appropriate technology*) dan pembangunan berpusat pada manusia (*people centered development*).

Pembangunan memerlukan modal, sehingga pemerintah pada waktu itu menggerakkan modal dengan mengundang investor asing dengan membuat kontrak karya sumberdaya mineral bernilai tinggi (tambang emas, minyak bumi dan gas), hutang luar negeri, mobilisasi tabungan masyarakat, menghimpun melalui pendapatan devisa, maupun usaha ekspor produk manufaktur. Pembangunan yang didominasi peran pemerintah nampak semakin tinggi mengandalkan pada utang luar negeri, sehingga lembaga seperti *The World bank, International Monetary Funds, Asian Development Bank, Islamic Development Bank* dan negara donor dari negara maju memberikan utang sekaligus meminta jaminan konsesi sumberdaya alam.

Berbagai perkembangan yang terjadi adalah semakin dinamis dan tumbuh pesat pembangunan di Jawa dan sektor industri dan perkotaan terus semakin kuat. Meski sektor pertanian diunggulkan, tetapi paruh waktu periode kepemimpinan Presiden Soeharto terjadi perubahan yang begitu besar bertumpu pada industri. Industri perhutanan nasional diberi konsesi untuk menebang jutaan hektar hutan tropis, industri berbasis komoditi impor dan konsesi sumberdaya alam diberikan pada kroni dan keluarga dekat penguasa. Terjadilah ekonomi yang dimotori para konglomerat baru atas kemudahan kebijakan penguasa. Lahirlah kesenjangan yang begitu lebar antara pengusaha konglomerat dengan usaha kecil dan koperasi. Sejumlah industri yang mendukung pertanian seperti industri pupuk, pestisida dan bibit unggul dikuasai oleh konglomerat; namun disisi lain sektor pertanian rakyat dan koperasi tidak bisa berkembang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Kesenjangan semakin melebar

antar sektor dan aktor maupun antar wilayah, antar pulau, dan antara desa dan kota.

Upaya pemerintah untuk mengatasi kesenjangan pembangunan, antara lain dengan kebijakan pembangunan Katimin (Kawasan Timur Indonesia) dan dirancang program KAPET (Kawasan Andalan Pengembangan Ekonomi Terpadu) di sejumlah lokasi dan kesenjangan desa kota dijawab dengan kebijakan Inpres Desat tertinggal (IDT). Berbagai upaya itu telah didorong, namun keberlanjutannya kurang dinamis dan maju karena pemerintah masih menjadi pelaku ekonomi yang dominan. Pada masa itu juga dilakukan pendekatan pengembangan kluster, seperti kluster industri kecil, pengembangan kawasan agropolitan, dan pusat pengembangan agribisnis perkebunan yang menyulam dan menggantikan perusahaan penebangan hutan.

Ketika krisis ekonomi 1997 dan diikuti dengan kemarau panjang yang mengakibatkan krisis ekologi, maka terjadi gelombang ketidakpuasan rakyat yang menjadi krisis multidimensi atau krisis total (Kristal), menyebabkan kekuasaan pemerintah yang dikelilingi para krono konglomerat itu mengalami keruntuhan. Pada bulan Mei 1998 terjadilah pergantian kekuasaan dari Soeharto ke BJ Habibie yang diwarnai situasi krisis dan ketidakteraturan. Reformasi menjadi credo untuk mengubah pembangunan yang otoriter dan sentralistis menuju kearah demokrasi dan desentralisasi.

Kini setelah otonomi daerah yang berkembang sejak 1999 telah memberi ruang pada daerah untuk mengembangkan wilayah. Pembangunan dilakukan semakin besar oleh pemerintah daerah dan masyarakat memiliki tingkat partisipasi publik yang semakin meningkat. Dengan otonomi daerah muncul kegarahan pembangunan daerah dan masyarakatnya sesuai dengan aspirasi yang ada di daerah. Namun

demikian perkembangan ini bukannya tanpa persoalan, banyak daerah yang mengalami konflik sosial dan pemborosan oleh pemerintahnya akibat dari kontestasi kepentingan dan konflik kekuasaan.

Dalam perkembangan mutakhir yaitu konteks relasi kepentingan dan kekuasaan pusat dengan daerah seperti inilah, maka tinjauan Geografi Regional terhadap masterplan MP3EI perlu dilakukan. Meninjau kembali dan mempertanyakan secara kritis kebijakan pembangunan ini akan dilakukan oleh siapa, menguntungkan siapa dan bagaimana keberlanjutannya.

Pengembangan Koridor Pembangunan Ekonomi (MP3EI)

Pengembangan koridor pembangunan ekonomi digunakan sebagai konsep dasar dalam MP3EI yang merupakan kepanjangan dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meluncurkan kebijakan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI) ini untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi terus digalakan oleh pemerintah.

MP3EI disusun berdasarkan optimisme pemerintah dalam melihat posisi Indonesia di antara negara-negara lain secara internasional. Indonesia mulai diperhitungkan dalam percaturan kebangkitan negara-negara Asia termasuk China dan India serta negara-negara kecil yang sudah sangat maju seperti Singapura, Hongkong, Macao, Korea Selatan. Indonesia termasuk negara yang dianggap demokratis dengan jumlah penduduk banyak yang mayoritas muslim dan memiliki kekayaan sumberdaya alam yang beragam dan melimpah. Diharapkan keberadaan *masterplan* ini mendorong visi

Indonesia menjadi 10 negara terbesar dunia di tahun 2025.

Mengapa pemerintah begitu yakin? Hal yang menjadi pertimbangan utama adalah kondisi makroekonomi Indonesia yang cukup menjanjikan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang di atas 6% dan GDP per kapita melebihi \$3000/tahun, Indonesia telah menjadi negara yang diperhitungkan di mata dunia. Dibuktikan pula oleh keberhasilan Indonesia bertahan dari *The Second Great Depression* pada tahun 2008, salah satu dari sedikit negara yang tidak terkena dampak signifikan.

Kementerian Koordinator Ekonomi menyusun MP3EI dan melaksanakan dengan melibatkan berbagai *stakeholder* mulai dari lembaga Negara lainnya (Bappenas, Komite Ekonomi Nasional, Komite Inovasi Nasional, dll) maupun pihak swasta (Kadin, UMKM, dll).

Tujuannya adalah terbentuknya integrasi pembangunan, agar masterplan ini tidak tumpang tindih dengan masterplan-masterplan lain yang telah ada. Secara umum, strategi utama dalam MP3EI ini antara lain: (1) Penguatan Koridor Ekonomi Indonesia, yaitu pemetaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di 6 koridor (Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku-Papua, Bali-NT); (2) Penguatan konektivitas nasional, visi yang diusung adalah *Locally Integrated Globally Connected*. Bagaimana agar menghubungkan pusat-pusat ekonomi maupun daerah terpencil agar terjadi *value chain* yang efektif di Indonesia; (3) Penguatan SDM dan IPTEK nasional.

Disebutkan bahwa penyusunan dokumen MP3EI yang hanya berlangsung singkat sekitar 3 bulan ini telah dilakukan dengan proses yang interaktif dan partisipatif. Proses semacam ini diharapkan terbentuk suatu *ownership* yang tinggi terhadap MP3EI serta terbangunnya komitmen bersama dari

berbagai pihak pemangku kepentingan untuk mensukseskan keberhasilan MP3EI. Semangat yang dihembuskan dalam MP3EI ini adalah *Not Business as Usual* akan terus berlanjut untuk terus melakukan berbagai terobosan dalam rangka percepatan transformasi ekonomi Indonesia demi mencapai visi Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, maju, adil, makmur (Buku Masterplan MP3EI. 2011:11).

MP3EI dikembangkan melalui pendekatan terobosan (*breakthrough*) yang didasari oleh semangat "tidak semata bisnis sebagaimana lazimnya" (*not business as usual*), melalui perubahan pola pikir bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya tergantung pada pemerintah saja, melainkan merupakan kolaborasi bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan Swasta. Dalam Keputusan Presiden No. 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI) menyebutkan bahwa kegiatan MP3EI adalah merupakan langkah awal untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju dan termasuk 10 negara besar di dunia pada tahun 2025 melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Tantangan yang harus dijawab oleh pemerintah sendiri adalah apakah birokrasinya dapat melayani pelaksanaan MP3EI ini? Bagaimana juga mensinkron-kan dengan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) yang meliputi segala aspek pembangunan? Pertanyaan kritis ini dijawab secara jelas bahwa MP3EI bukan dimaksudkan untuk mengganti dokumen perencanaan pembangunan yang telah ada seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (UU No. 17 Tahun 2007) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, namun menjadi dokumen yang terintegrasi dan

komplementer yang penting serta khusus untuk melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi (Buku Masterplan MP3EI. 2011:23).

Fokus dari pengembangan MP3EI ini diletakkan pada 8 program utama, yaitu pertanian, pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata, dan telematika, serta pengembangan kawasan strategis. Kedelapan program utama tersebut terdiri dari 22 kegiatan ekonomi utama yang sesungguhnya lebih pada pengembangan komoditas yang menjadi sumberdaya unggulan masing-masing koridor. Diharapkan kegiatan ekonomi tersebut akan menghasilkan peningkatan PDB di masing-masing koridor.

Melihat angka-angka pertumbuhan nasional PDB (2010-2025) rata-rata ini dibandingkan tiga pendekatan: *business as usual*, RPJM dan MP3EI. Angka ini cukup ambisius untuk memacu pertumbuhan di berbagai koridor tersebut, mengingat karakter wilayah, ketersediaan SDA dan kualitas SDM serta tingkat pembangunan (ketersediaan infrastruktur, listrik, energi, fasilitas pendidikan dan pusat riset) masih terkonsentrasi di Jawa dan beberapa pusat perkotaan di luar Jawa. Artinya belum merata dan masih belum siap sebagaimana dipikirkan, dianalisis, direncanakan dan diprogramkan oleh para pemikir elit ekonomi. Lalu siapa sesungguhnya yang akan melaksanakan mega proyek modernisasi ini dan siapa yang akan menikmatinya?

Presiden SBY mencoba meyakinkan berbagai pihak dan menyampaikan bahwa pelaksanaan MP3EI dilakukan untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi melalui pengembangan 8 (delapan) program utama yang terdiri dari 22 kegiatan ekonomi utama. Strategi pelaksanaan MP3EI dilakukan dengan mengintegrasikan tiga elemen utama yaitu: (a) mengembangkan potensi ekonomi wilayah di enam Koridor Ekonomi Indonesia, yaitu:

Koridor Ekonomi Sumatera, Koridor Ekonomi Jawa, Koridor Ekonomi Kalimantan, Koridor Ekonomi Sulawesi, Koridor Ekonomi Bali–Nusa Tenggara, dan Koridor Ekonomi Papua–Kepulauan Maluku; (b) memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara global (*locally integrated, globally connected*); (c) memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK nasional untuk mendukung pengembangan program utama di setiap koridor ekonomi.

Infrastruktur menjadi salah satu yang penting dalam program MP3EI. Total indikasi investasi pengembangan infrastruktur diperkirakan mencapai Rp 1.786 triliun. Infrastruktur jalan, rel kereta, tenaga listrik dan energi, serta telematika merupakan empat dari delapan jenis infrastruktur yang dominan menyerap investasi. Diharapkan semua koridor memiliki peluang untuk menangkap investasi domestik dan asing.

Ini semua memerlukan kepemimpinan yang kuat dan mengandaikan bahwa semua kepentingan tersebut dapat terakomodasi tidak hanya dalam dokumen, tetapi lebih penting dalam pelaksanaan dan pemanfaatan hasil pembangunan sehingga tercapai tujuan yang luhur mewujudkan masyarakat yang mandiri, maju, adil, makmur. Apakah nanti presiden baru akan melanjutkan *Masterplan* MP3EI ini atukah ini menjadi “paket jualan” bagi calon presiden baru nanti? Apa pun motifnya yang penting setiap rencana yang baik harus dilaksanakan dengan baik, apabila gagal harus berani bertanggungjawab dan bersedia belajar dari pengalaman.

MP3EI dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Berbagai pandangan kritis terhadap kebijakan MP3EI dikemukakan oleh berbagai pihak. Ada yang menyambut baik langkah terobosan untuk mewujudkan

pembangunan khususnya ekonomi dengan cara baru yang tidak biasa, namun ada pula yang meragukan kehandalan dan komitmen masterplan ini untuk terintegrasi dengan berbagai perencanaan yang telah ada. Dewan Pengarah Sabang Merauke Circle (SMC) Arwin Lubis menilai, Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) merupakan kapitalisme semu. Sebab, MP3EI ini merupakan perpaduan antara penguasa dan pengusaha.

“Selama MP3EI berjalan, kesenjangan juga makin melebar. Karena pendekatan MP3EI jelas dikatakan melalui keppres dengan pendekatan lama yang memerlukan kolaborasi semua pihak, yakni pemerintah dan swasta untuk mencapai pertumbuhan,” ujar Arwin di Jakarta. Lebih lanjut dikatakan bahwa: “kalau digeneralisasi pemerintah pusat dan daerah adalah penguasa. BUMN dan pengusaha swasta adalah kolaborasi pengusaha. Jadi MP3EI adalah kolaborasi pengusaha dan penguasa. Ini yang biasa disebut dengan kapitalisme semu, yang tidak mau bersaing dengan bisnis sehat” (Kompas 16-2-2012).

Sementara itu pengamat ekonomi M Fadhil Hasan, mengatakan, secara historis atau konseptual MP3EI merupakan bentuk ketidakpuasan terhadap RPJPM yang dinilai masih pada tataran normatif. Sinyalemen ini pada dasarnya mempertanyakan mengenai perencanaan pembangunan, mengapa telah ada perencanaan menyeluruh masih ada lagi percepatan sektoral dalam hal ini perluasan dan percepatan ekonomi. Bisa jadi RPJM dianggap masih terlalu sempit *business as usual*, sedangkan MP3EI ingin mengembangkan peran asing yang lebih luas. Menurut dia, MP3EI hanya memberikan ruang bagi pelaku ekonomi asing melalui instrumen liberalisasi perdagangan.

“Jadi, menurut saya, persoalan pentingnya adalah masalah struktur ekonomi yang

masih timpang. Tapi pendekatan MP3EI kenyataannya masih berdasarkan pertumbuhan. MP3EI hanya memberi ruang yang besar bagi pelaku ekonomi asing melalui instrumen liberalisasi perdagangan”.

Apakah benar dengan MP3EI dapat mengubah kesenjangan struktur ekonomi di daerah atau justru malah bisa menyebabkan semakin parah kesenjangan antar daerah. Daerah tertinggal adalah suatu daerah kabupaten yang wilayah dan masyarakatnya relatif tertinggal bila dibanding dengan daerah lainnya yang lebih maju dilihat dari ukuran rata-rata nasional. Oleh karena itu, penekanan bagi daerah tertinggal, pendekatan pembangunannya tidak bisa secara normatif lazimnya bagi daerah maju, namun perlu ada strategi pendekatan yang bersifat terobosan yang akseleratif atau afirmatif, bahkan kalau perlu suatu lompatan ke depan sebagai suatu upaya pembangunan dinamis yang mendasar (Zaini, 2011) (Gambar 1).

Terobosan atau lompatan ke depan yang dimaksud antara lain, berupa sistem pembiayaan pembangunannya dan dukungan substitusi teknologi sebagai akseleratornya. Sistem pembiayaan pembangunan yang berpihak kepada daerah tertinggal yang dilengkapi dengan alternatif pembiayaan bernuansa investasi, yang dapat mendorong dinamika pembangunan daerahnya. Sedangkan yang dimaksud dengan substitusi teknologi bagi daerah tertinggal harus dimulai dari perilaku inovatif dari daerah yang bersangkutan.

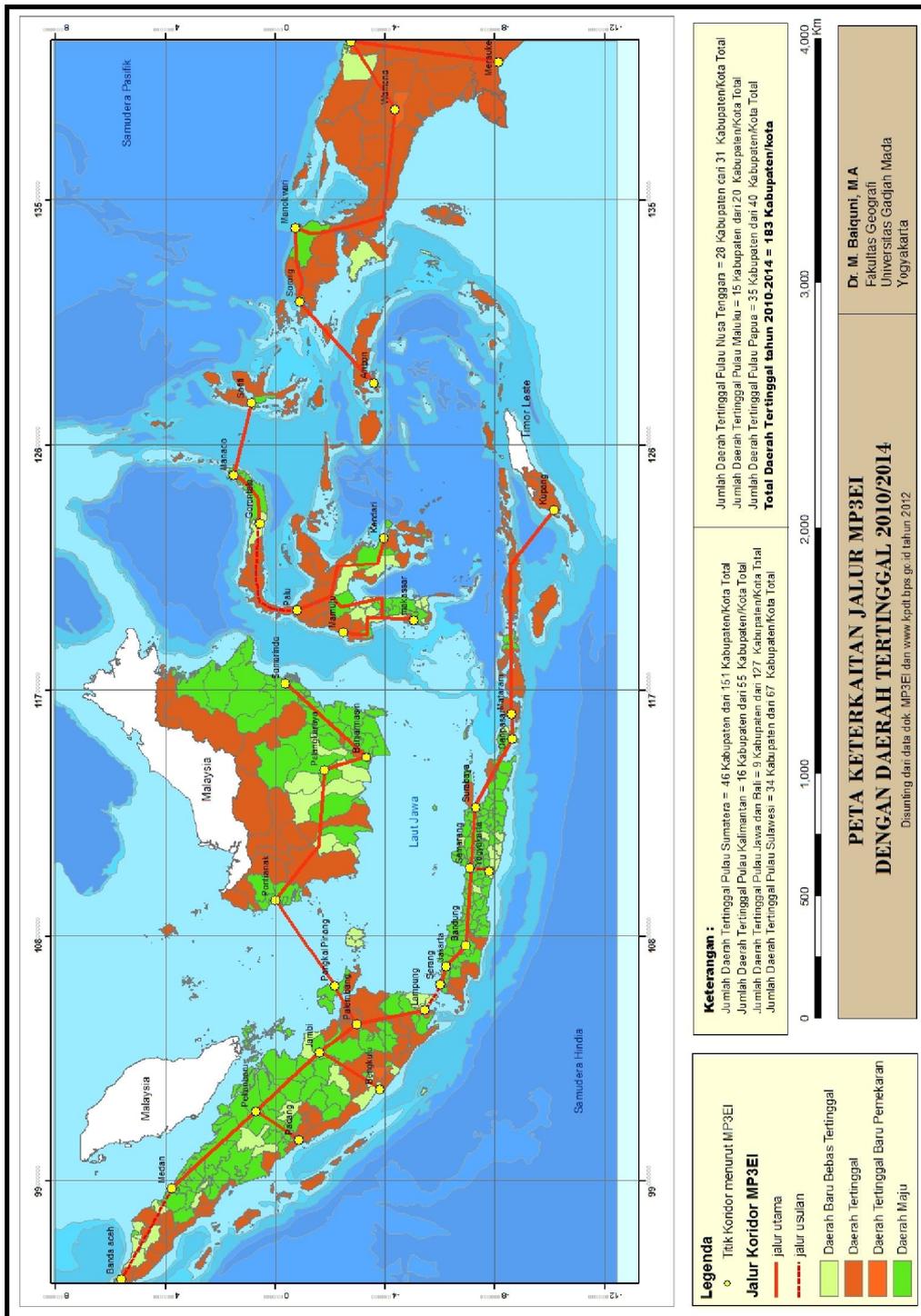
Sehubungan dengan itu daerah tertinggal bisa berperan sebagai wilayah penyangga kegiatan pembangunan di suatu koridor, ataupun bahkan bisa berperan sebagai wilayah utama kegiatan pembangunan daerah tertinggal di suatu koridor. Dengan demikian, maka kontribusi peran Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT), dengan kegiatan MP3EI perlu dirumuskan, disusun, dan ditetapkan secara terencana, terstruktur, dan sistemik-sistematis, sehingga implikasinya bagi daerah tertinggal akan memberi dampak

positif bagi pelaksanaan pembangunan di setiap koridor.

Secara garis besar sebaran daerah tertinggal pada Koridor Ekonomi Sumatera, Koridor Ekonomi Jawa, Koridor Ekonomi Kalimantan, dan Koridor Ekonomi Sulawesi berada pada wilayah penyangga. Sedangkan sebaran daerah tertinggal pada Koridor Ekonomi Bali–Nusa Tenggara, dan Koridor Ekonomi Papua–Kepulauan Maluku berada pada wilayah utama. Sebagaimana hasil tumpang susun peta (*map overlay*) sebaran daerah tertinggal dengan koridor MP3EI dapat dianalisis bahwa: (1) Koridor MP3EI terletak di wilayah yang selama ini telah maju dan memiliki hubungan yang kuat seperti terlihat di JLS (Jalur Lintas Sumatera) dan wilayah pantai utara Jawa; (2) Koridor Kalimantan terlihat sebagian besar tidak melewati daerah tertinggal yang umumnya diperbatasan dan merupakan kawasan konservasi hutan belantara; (3) Koridor Sulawesi sebagian melewati daerah tertinggal seperti di Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah dan tenggara; (4) Koridor Bali dan NTT maupun Papua kebanyakan merangkai dengan daerah tertinggal.

Hasil analisis tumpang susun peta juga menunjukkan bahwa koridor pembangunan yang digambarkan hanya keterhubungan darat, belum secara eksplisit digambarkan bagaimana keterhubungan transportasi laut secara lebih mendetail dan konkrit. Kajian dokumen MP3EI juga memperlihatkan gambaran pembangunan koridor darat yang lebih dominan dibandingkan penggambaran detail keterhubungan laut. Ini menunjukkan bahwa MP3EI masih didominasi pembangunan infrastruktur darat dibanding pembangunan infrastruktur kelautan.

Berkaitan dengan eksisting kekuatan ekonomi penggerak pembangunan di daerah tertinggal perlu dipetakan pula. Sebaran aktivitas BUMN dan atau BUMD dan atau swasta nasional pada wilayah operasinya masing-masing di daerah tertinggal akan



Sumber: data primer

Gambar 1. Peta Keterkaitan Jalur MP3EI dengan Daerah Tertinggal 2010/2014

menjadi bahan pertimbangan pelengkap. Dengan demikian, maka gambaran peta potensi sebaran daerah tertinggal yang berlandaskan pada ketiga hal dimaksud (wilayah utama atau penyangga dengan karakteristik potensi wilayah dalam wilayah operasi suatu BUMN, BUMD, dan swasta) akan menjadi kebutuhan nyata yang perlu dikaji lebih komprehensif pada koridor ekonomi nasional.

Adanya kesenjangan pembangunan disebabkan karena lemahnya dinamika dan daya bangkit suatu daerah atau pulau serta lemahnya konektivitas antar daerah atau kepulauan. Aktivitas ekonomi hanya terkonsentrasi di kawasan perkotaan dan beberapa pusat pertumbuhan dengan investasi dan kegiatan ekonomi khusus seperti pertambangan dan perkebunan skala besar yang merupakan pusat-pusat pertumbuhan suatu wilayah. Keterbatasan infrastruktur transportasi (jalan desa, jembatan desa, pelabuhan perintis); infrastruktur informasi dan telekomunikasi (desa pintar, rumah pintar, desa berdering); infrastruktur sosial dan ekonomi (Puskesmas Terapung, pasar desa); serta infrastruktur energi (listrik desa) menjadi penyebab kegiatan ekonomi daerah berbasis industri tidak dapat menyebar ke daerah-daerah tertinggal yang terisolir.

Sebagai dukungan terhadap upaya pengembangan potensi ekonomi wilayah di Koridor Ekonomi Indonesia dengan memperhatikan sistem konektivitas nasionalnya, maka diperlukan SDM yang berkualitas dengan aplikasi IPTEK yang tepat guna. SDM yang berkualitas diperlukan bagi daerah tertinggal, karena wujud kualitasnya akan merupakan jaminan awal keberhasilan pelaksanaan pembangunan bagi daerah tertinggal. Sedangkan aplikasi IPTEK yang tepat guna akan menjadi alat yang digunakan oleh SDM berkualitas tersebut di daerah. Kekuatan budaya dan kemajemukan masyarakat di daerah-daerah juga bisa diperhitungkan menjadi pilar penting pembangunan. Bahkan budaya seyogyanya menjadi

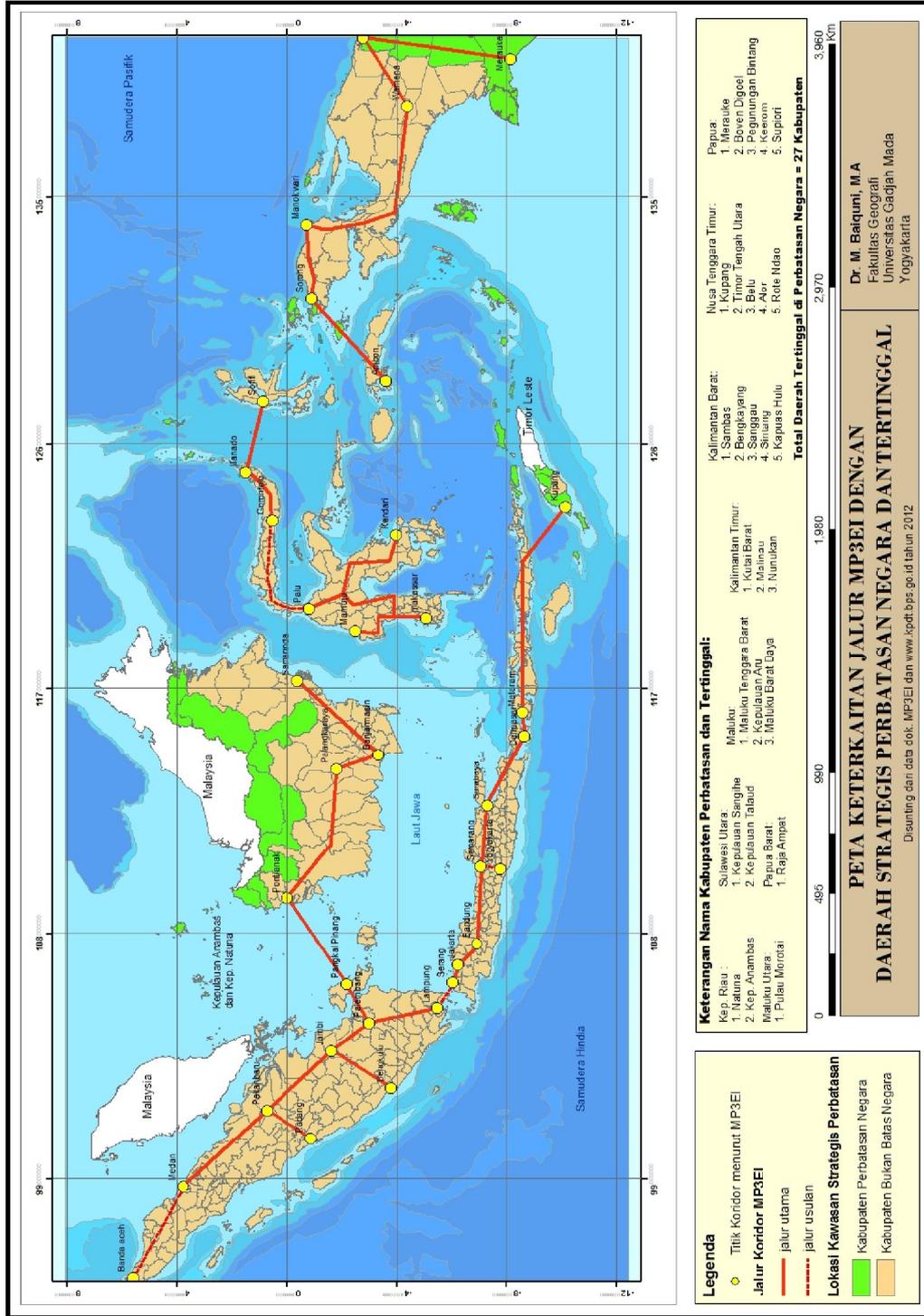
wawasan bagi pembangunan ekonomi yang sesuai dengan jati diri masing-masing daerah.

MP3EI dan Wilayah Perbatasan

Wilayah perbatasan menjadi salah satu isu penting yang menarik untuk dibahas terkait dengan MP3EI, mengingat wilayah perbatasan umumnya masih tertinggal dan dianggap wilayah pinggiran yang kurang diperhatikan. Banyak kabupaten yang merupakan perbatasan dengan negara tetangga seperti di Kalimantan dengan wilayah Serawak, Malaysia ternyata tidak dilalui koridor pembangunan MP3EI. Hanya beberapa kabupaten di Papua yang berbatasan dengan Papua New Guinea yang terangkai dengan koridor pembangunan MP3EI.

Sebagian besar wilayah perbatasan Kalimantan dengan Serawak merupakan daerah tertinggal bila dilihat dari pembangunan ekonomi saja. Namun bila kita mencermati lebih mendalam, wilayah tersebut memiliki hutan hujan tropis yang penting sebagai fungsi pelesarian ekosistem dengan keragaman hayati yang tinggi. Wilayah ini sering disebut *Hart of Borneo* atau jantung konservasi yang sangat penting bagi pulau Kalimantan (Gambar 2).

Dari hasil tumpang susun peta (*map overlay*) di atas dapat dilihat bahwa wilayah perbatasan yang berbasis darat umumnya masih berupa hutan belantara seperti di Kalimantan dan Papua. Dari sisi kepentingan konservasi, maka pendekatan pembangunan dan cara pengembangan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan tentu tidak sama dengan *masterplan* MP3EI yang berbasis percepatan pertumbuhan dan perluasan melalui koridor dan komoditi unggulan. Wilayah konservasi memerlukan pendekatan pembangunan yang berbasis ekosistem dan ekonomi lestari (*green economy*). Gagasan ini belum diadopsi dan diinovasi dalam



Sumber: data primer

Gambar 2. Peta Keterkaitan Jalur MP3EI dengan Daerah Strategis Perbatasan Negara dan Tertinggal

MP3EI, sehingga bisa diajukan pertanyaan apanya yang "Not Business as Usual"?

Memang tidak bisa berharap banyak pada MP3EI untuk mengurus konservasi ekosistem dan kelestarian sumberdaya dan lingkungan hidup. Bisa dipahami memang ada perbedaan ide percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi dengan upaya pelestarian dan pemuliaan lingkungan hidup. Namun tantangan bagi totalitas pembangunan berkelanjutan negara kepulauan Republik Indonesia ini adalah bagaimana menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian ekosistem, pembangunan fisik dengan pembangunan manusia, pembangunan desa dan kota dalam bingkai *Bhinneka Tunggal Ika*.

Tantangan Implementasi Kebijakan MP3EI

Tantangan yang dihadapi untuk memulai langkah implementasi program MP3EI adalah menyelesaikan persoalan kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan. Usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkeadilan terus dilakukan oleh Pemerintah. Berbagai kebijakan telah digulirkan. Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkeadilan, misalnya, pemerintah menggulirkan program *pro-growth*, *pro-job*, dan *pro-poor* yang disebut sebagai *Triple Track Strategy*.

Untuk program *pro-poor*, misalnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mencakup tiga klaster. Klaster pertama, bantuan dan perlindungan sosial berbasis keluarga melalui kebijakan dan program Jamkesmas, Jampersal, BOK, Raskin, PKH, BOS, dan beasiswa untuk siswa/mahasiswa miskin. Klaster kedua, program pemberdayaan masyarakat melalui program PNPM Mandiri, baik PNPM Mandiri di perkotaan maupun di perdesaan. Klaster ketiga adalah

program pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui program Kredit Usaha Kecil (KUR) bagi peningkatan permodalan kerja para wirausaha, kelompok usaha dan koperasi.

Selain tiga klaster itu, Pemerintah kemudian mengembangkan program klaster keempat, yaitu: program murah untuk rakyat. Program ini memberikan "sesuatu" dengan harga murah, sebagian dibantu pemerintah, yang mencakup rumah, kendaraan angkutan, air bersih, listrik, kehidupan nelayan, dan kehidupan masyarakat terpinggirkan perkotaan. Upaya ini untuk mengurangi kesenjangan social yang terjadi ditengah kehidupan masyarakat.

Tantangan selanjutnya adalah reformasi birokrasi yang sangat besar dan kinerjanya lambat. Meski teknologi informasi dan komunikasi (TIK) semakin canggih, tapi sebagian besar birokrasi belum secara efektif memanfaatkan kehandalan TIK ini. Masalah koordinasi lintas sektor dan antar daerah juga menjadi kerumitan tersendiri, sebagai akibat dari ego sektoral dan kompleksitas demokrasi pilihan langsung pimpinan pemerintahan. Banyaknya undang-undang dan peraturan daerah juga bisa menjadi penghambat birokrasi.

Di era otonomi daerah, ego kedaerahan semakin menguat baik dalam konotasi positif maupun negatif. Banyak daerah otonom yang dengan cepat menjual asset sumberdaya alam dan seperti banyak yang lepas kendali. Kecenderungan yang terjadi para pejabat melepas asset sebanyak-banyaknya kepada mitra kerja yang telah mendukungnya dalam pemenangan pemilihan kepala daerah. Fenomena ini banyak disampaikan para pengamat dan tokoh masyarakat yang diwawancarai secara mendalam mengenai perkembangan pembangunan daerah di era otonomi. Akibatnya kerusakan lingkungan semakin luas dan bencana banjir maupun pencemaran menjadi ancaman serius bagi masyarakat banyak.

Apakah implementasi kebijakan MP3EI akan bisa memperbaiki kerusakan lingkungan atau justru turut serta mempercepat kerusakan lingkungan dan memperluas ancaman bencana? Memang sudah selayaknya koridor MP3EI tidak melewati kawasan konservasi seperti di *Sumatra Tropical Rain Forest World Heritage, Hart of Borneo*, maupun taman Nasional Pegunungan Lorentz Papua. Namun pengembangan koridor perlu memperhatikan ekosistem makro maupun mikro dimana komoditi ekonomi unggulan ditambang, diolah atau ditumbuhkan. Sebab tanpa kepedulian terhadap lingkungan, maka pertumbuhan ekonomi akan tenggelam bersama oleh bencana yang akan menimpa.

Isu kedaulatan atas sumberdaya dan lingkungan juga menjadi tantangan yang serius mengingat sesuatu yang dilakukan secara cepat dan meluas akan membawa perubahan drastis atas keseimbangan yang telah ada. Saat ini kedaulatan atas sumberdaya dalam titik nadir, karena telah banyak sumberdaya alam Indonesia dieksploitasi oleh perusahaan asing dari Amerika, Eropa, Jepang, Australia dan belakangan masuk dua raksasa baru yaitu Cina dan India. Mampukah implementasi kebijakan MP3EI mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat ataukah justru turut merebutnya dan menyerahkan ke konglomerat?

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) *Bhinneka Tunggal Ika* belum menjadi basis ideologi MP3EI, sehingga kecenderungan mengarah pada monokulturisasi pembangunan yaitu pembangunan ekonomi pertumbuhan dengan pilar utama mega proyek dan investasi asing; (2) Koridor MP3EI melintasi jalur yang selama ini sudah berkembang terutama di Sumatera dan Jawa serta Bali. Dalam kaitannya dengan perluasan belum bisa menyambung antara

koridor MP3EI dengan daerah-daerah tertinggal dan belum muncul strategi jitu untuk mendongkrak ketertinggalan tersebut. Koridor MP3EI juga belum memperkuat pembangunan wilayah perbatasan di Kalimantan; (3) Implementasi kebijakan MP3EI masih harus menjawab tantangan besar yaitu: (a) sinkronisasi dengan RPJM dan RPJP Nasional, tata ruang, dan kebijakan otonomi daerah; (b) Reformasi birokrasi juga menjadi semakin rumit ketika orientasi pusat dengan daerah tidak sejalan dan kepentingan antar sektor berbeda, serta (c) Kualitas kepemimpinan dan SDM birokrasi yang belum prima.

Adapun saran yang dapat dikemukakan melalui penelitian ini adalah: Kebijakan MP3EI yang diluncurkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus memiliki dasar yang kuat yaitu Pancasila dan *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai manifestasi bangsa yang majemuk yang dipersatukan dalam cita cita luhur. Pelaksanaannya diharapkan mengokohkan kedaulatan rakyat dengan mencerdaskan rakyat dalam berekonomi, membuka kesempatan seluas-luasnya bagi investor dalam negeri dan menjadikan rakyat Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri, sebelum membuka diri dan bekerjasama dengan bangsa asing. Memberikan kompensasi program pembangunan yang sifatnya *affirmative* kepada daerah tertinggal dan wilayah perbatasan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Fakultas Geografi dan Pusat Studi Pariwisata, Universitas Gadjah Mada yang telah memberi hibah dana penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Prof. Dr. J. Nasikun yang telah memberi pengkayaan ilmu sosial dan politik, juga kepada Prof. Dr. Rijanta yang telah menjadi mitra diskusi mengenai geografi regional.

DAFTAR PUSTAKA

- Baiquni, M. (1998) "Transformasi Wilayah di Era Globalisasi, Model-Model Kerjasama Segitiga Pertumbuhan". Makalah dalam *Reorientasi Baru Riset Geografi di Segitiga Pertumbuhan Joglosemar*. Fakultas Geografi UGM (tidak dipublikasikan).
- Baiquni, M. (2004) *Membangun Pusat-Pusat di Pinggiran: Otonomi Di Negara Kepulauan*. PKPEK dan ideAs. Yogyakarta
- Fukuyama, Francis. (1995) *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. Hamish Hamilton. London.
- Giyarsih, Sri Rum. (2010) "Pola Spatial Transformasi Wilayah di Koridor Yogyakarta dan Surakarta". *Forum Geografi*. Vol 24, No 1, Juli 2010: 28-38.
- Kementerian Koordinator Perekonomian RI. (2011) *Dokumen Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025*. Jakarta
- Kompas 16-2-2012 *MP3EI Merupakan Kapitalisme Semu*. Kompas, Jakarta.
- Muta'ali, L. (1998) "Transformasi Spasial Perkotaan dan Segitiga Pertumbuhan Ekonomi". Makalah dalam *Diskusi Transformasi Wilayah*. Fakultas Geografi UGM. (tidak dipublikasikan).
- Nir, Dov. (1990) *Region as a Socio-environmental System: An Introduction to a Systematic Regional Geography*. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht.
- Ohmae, Kenichi. (1995) *The End of the Nation State: The Rise of Regional Economies*. HarperCollins Publishers. London.
- Page, J. (1992) *Political Geography*. Oxford University, United Kingdom.
- Sasono, Adi dkk (ed.). (1993) *Pembangunan Regional dan Segitiga Pertumbuhan*. CIDES-Center for Information and Development Studies. Jakarta
- Seers, Dudley. (1979) *The Meaning of Development, with a Postscript*. In Seers, Nafziger, Cruise O'Brien, & Bernstein, pp. 9-30.
- Soesastro, Hadi. (1992) "Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Pasifik Barat Hingga Tahun 2010 dan Implikasinya Bagi Permintaan Energi" *Analisis CSIS Tahun XXI No. 6/1992*. Centre for Strategic and International Studies. Jakarta.
- Wesnawa, I Gede Astra. (2010) Dinamika Pemanfaatan Ruang Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Dalam *Jurnal Forum Geografi*. Vol 24, No 1, Juli 2010: 1-11.
- Zaini, Helmy Faishal. (2011) *MP3EI dan Peran Daerah Tertinggal*. Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI, Jakarta.